

Tingkat Kemakmuran dan Keadilan Masyarakat Indonesia: Perbandingan Antar Propinsi

Uzair Suhaimiⁱ

uzairsuhaimi.wordpress.com

Judul artikel terkesan tendensius dilihat dari sisi substansi maupun metodologi. Substansinya terkesan tendensius karena terkait dengan visi bangsa yang dinilai luhur oleh anak bangsa yaitu masyarakat adil dan makmurⁱⁱ. Dari sisi metodologi, judul artikel juga terkesan tendensius: Bagaimana mengukur tingkat kemakmuran maupun keadilan? Sebagaimana akan segera dijelaskan, kesan tendensius semacam itu tidak beralasan.

Artikel dimaksudkan untuk memotret posisi-relatif propinsi terhadap posisi nasional dalam hal terkait dengan isu kemakmuran dan keadilan menggunakan “alat potret” sejumlah indikator sosial-ekonomi yang dianggap relevan. Alat potret yang digunakan merupakan produk Badan Pusat Statistik (BPS) terkini sehingga profil yang ditampilkan menggambarkan status-terkini pula.

Alat Potret: Indikator yang Digunakan

Kemakmuran

Indikator kemakmuran yang mungkin paling populer--- sekalipun semakin disadari keterbatasannya---adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai tambah dari kegiatan perekonomian (produksi barang dan jasa) suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya setahun) yang dinilai berdasarkan mata uang. Agar dapat dibandingkan antar propinsi, artikel ini menggunakan PDB per kapita, bukan PDB total, sebagai ukuran. Selain PDB per kapita, dua indikator lain digunakan sebagai kandidat atau komplemen: (1) pertumbuhan PDB (total), dan (2) proporsi penduduk yang bekerja atau berusaha di lapangan usaha non-pertanian.

Catatan penting untuk dikemukakan adalah bahwa PDB ‘lebih aman’ jika ditafsirkan sebagai ukuran kemakmuran dari suatu negara atau wilayah, bukan kemakmuran penduduk yang tinggal di negara atau wilayah itu. Catatan ini penting karena, negara atau propinsi yang ‘kaya’ terbukti secara empiris tidak selalu kaya penduduknya.

Keadilan

Secara logis keadilan terkait dengan distribusi kekayaan: semakin merata distribusi kekayaan semakin adil. Jika kekayaan dinikmati oleh segelintir orang maka sulit untuk mengatakan ada keadilan.

Ukuran ketimpangan distribusi kekayaan yang mungkin paling populer adalah Rasio Gini yang membandingkan sebaran penduduk dengan sebaran kekayaan. Ukuran ini terletak antara 0 dan 1: 0 menggambarkan distribusi yang merata secara sempurna, 1 menggambarkan distribusi yang tidak merata secara sempurna (hipotetis). Demikian, semakin tinggi angka Rasio, semakin timpang distribusi.

Selain Rasio Gini artikel ini menggunakan lima kandidat atau komplemen indikator lainnya yang secara sepintas lalu tampak saling terkait:

- Lowest40: Bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen termiskin; angka yang semakin tinggi menunjukkan distribusi yang semakin merata.
- Top20: Bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok 20 persen terkaya; angka yang semakin tinggi menunjukkan distribusi yang semakin timpang.
- Inequality: Rasio antara Top20 dan Lowest40 (dikalikan 100); angka yang semakin tinggi menunjukkan distribusi yang semakin timpang.
- Pov-q0: Persentase penduduk yang tergolong miskin; angka yang semakin tinggi menunjukkan situasi yang semakin tidak adil.
- Unempl: Persentase angkatan kerja yang menganggur; angka yang semakin tinggi menunjukkan situasi yang semakin tidak adil.

Tabel 1 menyajikan daftar indikator yang digunakan sebagai alat potret kemakmuran dan keadilan sebagaimana baru saja diulas, termasuk sumber data dan tahunnya. Perbandingan antar propinsi menggunakan pasangan indikator dimaksudkan untuk mengidentifikasi posisi relatif propinsi dalam skala nasional.

Potret Nasional: Seberapa Makmur Indonesia?

Bagaimana potret kemakmuran dan keadilan masyarakat Indonesia? Apakah tingkatnya sudah tinggi? Apakah ada kecenderungan naik?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu jelas tergantung kepada indikator, alat ukur atau alat potret yang digunakan. Jika menggunakan indikator sebagaimana yang disajikan Tabel 1 maka dapat dikatakan secara meyakinkan bahwa tingkat kemakmuran maupun keadilan relatif tinggi dan perkembangannya memperlihatkan kenaikan yang signifikan.

Tabel 1: Beberapa Indikator yang Digunakan dalam Analisis

Dimensi	Variabel dan Indikator	Sumber Data dan Tahun
Kemakmuran	1. GDP_Cap: Prdouk Domestik Bruto Per Kapita	BPS, berbagai sumber; 1999
	2. Growth: Pertumbuhan PDB 2008-2009	Sama dengan 1
	3. Prop_NonAgric: Persentase pekerja non-pertanian	Diolah dari Sakernas 2009 (Agustus)
Keadilan	4. Gini_Ratio: Indeks rasio Gini (rentang: 0-1)	Diolah dari Susenas Modul 2009
	5. Lowest40: Bagian pengeluaran 40% terendah	Sama dengan 4
	6. Top20: Bagian pengeluaran 20% tertinggi	Sama dengan 4
	7. Inequality: $\text{Top20}/\text{Lowest40} \times 100$	Dihitung
	8. Pov-q0: Persentase penduduk miskin	Sama dengan 4
	9. Unempl: Persentase penduduk yang menganggur (Tingkat Pengangguran terbuka, TPT)	Sama dengan 3

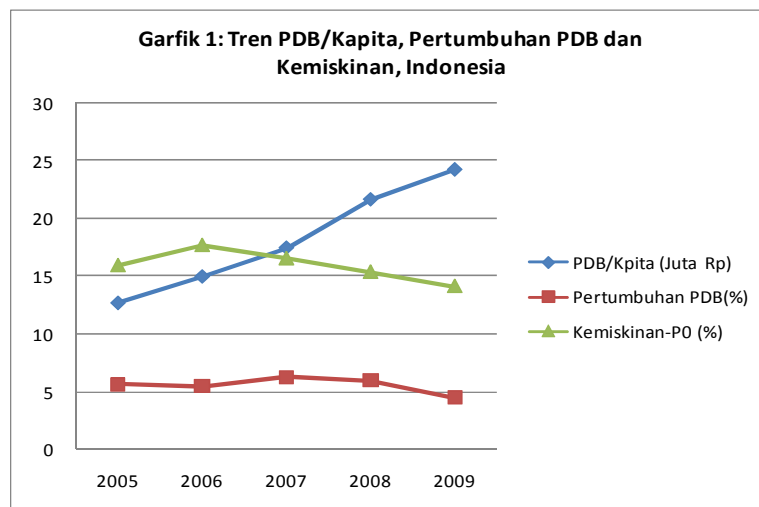
Sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 dan Grafik 1, Indonesia secara keseluruhan sama-sekali bukan negara miskin. Dengan PDB per kapita per tahun sekitar 24.3 juta rupiah atau hampir US\$ 2600 maka posisi Indonesia dalam skala internasional pada tahun 2009 jelas bukan terletak pada kelompok negara-negara termiskin; posisinya paling tidak menempati paling tidak menengah bawah (*low-middle*). Trennya selama kurun 2005-2009 meningkat (Grafik 1). Berbeda dengan tren PDB/kapita, tren total PDB

selama kurun itu tidak terlalu menjanjikan; kenaikan hanya terjadi dalam kurun 2006-2007, selebihnya cenderung turun.

Rasio Gini naik selama kurun 2005-2007 tetapi terus turun pada tahun-tahun berikutnya. Pov-q0, persentase penduduk miskin, naik dalam kurun 2005-2006 tetapi kemudian turun terus pada kurun-kurun berikutnya.

Tabel 2
Beberapa Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia

	2005	2006	2007	2008	2009
<u>PDB/Kpita:</u>					
Dalam Juta Rupiah	12.7	15.0	17.5	21.7	24.3
Dalam US\$	1,318	1,663	1,938	2,270	2,590
Pertumbuhan PDB(%)	5.70	5.50	6.30	6.00	4.50
Kemiskinan-Pov_q0 (%)	16.0	17.8	16.6	15.4	14.2
Rasio Gini	0.343	0.357	0.376	0.368	0.367



Perlu dikemukakan bahwa sebagai gambaran agregatif, potret nasional ini sudah memberikan gambaran menyeluruh. Walaupun demikian perlu dicatat bahwa gambaran itu hanya dapat dipercaya (*reliable*) dan tidak *misleading* jika variasi antar propinsi tidak terlalu besar.

Hubungan antar Indikator

Analisis singkat menggunakan matriks korelasi dapat memperjelas gambaran mengenai hubungan logis antar berbagai aspek kemakmuran dan

keadilan---sejauh yang dapat diukur dan tersedia datanya. Tabel 3 menyajikan matriks yang dimaksud yang dihitung berdasarkan data propinsi tahun 2009. Yang perlu dikemukakan adalah bahwa korelasi menyatakan hubungan probabilistik, bukan hubungan niscaya (deterministik).

Tabel 3:
Matriks Korelasi antara Berbagai Variabel Sosial-Ekonomi

		Correlations								
		GDP_Cap	Growth	Prop_NonAgric	Gini_Ratio	Lowest40	Top20	Inequality	Pov_q0	Unempl
GDP_Cap	Pearson Correlation	1	-.096	.463**	.197	-.292	.227	.278	-.301	.403*
	Sig. (2-tailed)		.594	.007	.272	.099	.204	.118	.089	.020
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Growth	Pearson Correlation	-.096	1	-.305	.364*	-.274	.195	.250	.405*	-.297
	Sig. (2-tailed)	.594		.084	.037	.123	.277	.161	.019	.093
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Prop_NonAgric	Pearson Correlation	.463**	-.305	1	.091	-.290	.333	.326	-.527**	.591**
	Sig. (2-tailed)	.007	.084		.614	.102	.058	.064	.002	.000
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Gini_Ratio	Pearson Correlation	.197	.364*	.091	1	-.864**	.812**	.864**	.276	.200
	Sig. (2-tailed)	.272	.037	.614		.000	.000	.000	.120	.264
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Lowest40	Pearson Correlation	-.292	-.274	-.290	-.864**	1	-.921**	-.978**	-.039	-.215
	Sig. (2-tailed)	.099	.123	.102	.000		.000	.000	.831	.230
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Top20	Pearson Correlation	.227	.195	.333	.812**	-.921**	1	.959**	.087	.301
	Sig. (2-tailed)	.204	.277	.058	.000	.000		.000	.632	.089
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Inequality	Pearson Correlation	.278	.250	.326	.864**	-.978**	.959**	1	.062	.302
	Sig. (2-tailed)	.118	.161	.064	.000	.000	.000		.734	.088
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Pov_q0	Pearson Correlation	-.301	.405*	-.527**	.276	-.039	.087	.062	1	-.258
	Sig. (2-tailed)	.089	.019	.002	.120	.831	.632	.734		.147
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Unempl	Pearson Correlation	.403*	-.297	.591**	.200	-.215	.301	.302	-.258	1
	Sig. (2-tailed)	.020	.093	.000	.264	.230	.089	.088	.147	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel itu dapat ditarik paling tidak lima kesimpulan berikut:

- PDB/kapita secara positif berhubungan dengan lapangan usaha penduduk yang bekerja: semakin tinggi lapangan usaha non-pertanian, PDB per kapita cenderung semakin tinggiⁱⁱⁱ.
- PDB/kapita secara positif berhubungan dengan angka penganggur: semakin tinggi PDB per kapita, pengangguran cenderung semakin tinggi^{iv}.

- Hubungan antara PDB/kapita dengan angka kemiskinan (Pov-q0) dan indikator-indikator ketimpangan (Rasio Gini, Lowest 40, Top20 dan Inequality) secara statistik tidak signifikan^v.
- Pertumbuhan PDB (total) secara positif berhubungan dengan Rasio Gini dan angka kemiskinan: semakin tinggi angka pertumbuhan, Rasio Gini dan angka kemiskinan cenderung semakin tinggi^{vi}.
- Lapangan usaha non-pertanian secara negatif berhubungan dengan kemiskinan dan secara positif dengan pengangguran: semakin tinggi proporsi lapangan usaha non-pertanian, angka kemiskinan cenderung semakin rendah dan angka pengangguran semakin tinggi^{vii}.

Potret Propinsi: Mana Propinsi yang Relatif Paling Ideal?

Propinsi Makmur dan Merata

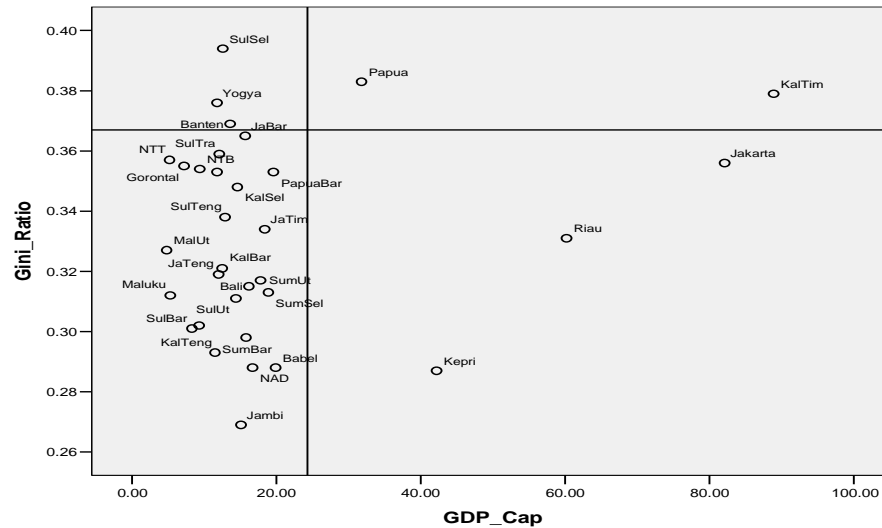
Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, antara kemakmuran dan pemerataan tidak ada kaitan^{viii}. Ini berarti, propinsi yang kaya dapat saja memiliki distribusi kekayaan yang merata atau timpang. Bagian ini dimaksudkan untuk memotret mana propinsi yang 'ideal' dalam arti relatif makmur (diukur dengan PDB/kapita) tetapi juga relatif merata distribusi kekayaannya (dikur dengan Rasio Gini); mana yang sebaliknya.

Grafik 2 memperlihatkan lima propinsi yang relatif makmur dalam arti memiliki GDP/kapita di atas rata-rata nasional (=Rp 24.3 juta): Kalimantan Timur, Jakarta, Riau, Kepulauan Riau dan Papua. Walaupun demikian, Kalimantan Timur dan Papua (pada Grafik 2 terletak dalam Kuadran I menurut system Kartesian) kurang ideal karena memiliki tingkat ketimpangan di atas rata-rata (0.367). Dengan demikian, propinsi yang ideal dalam arti memiliki GDP/kapita di atas rata-rata nasional dan Rasio Gini di bawah rata-rata nasional adalah Kepulauan Riau, Riau dan Jakarta (Kuadran IV).

Bagaimana dengan propinsi yang paling tidak ideal dalam arti relatif kurang makmur dan juga timpang distribusi pendapatannya? Ada tiga propinsi

yang tergolong kategori ini: Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Banten (Kuadran II).

Grafik2: Kemakmuran V.S Ketimpangan



Propinsi Makmur dan Tidak Miskin

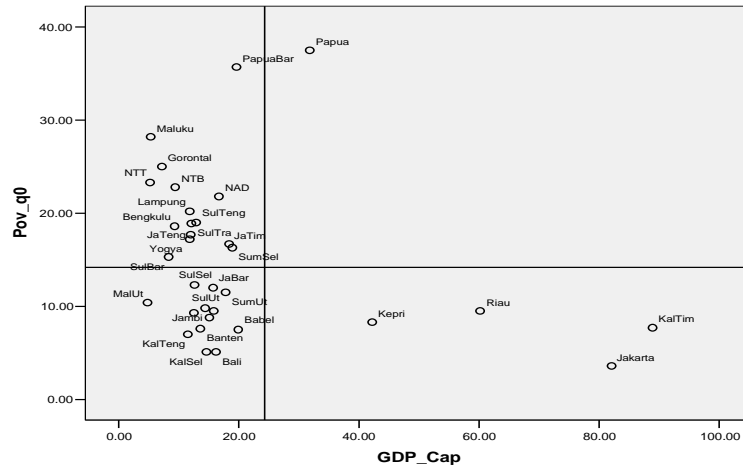
Tabel 2 menunjukkan bahwa hubungan antara kemakmuran wilayah dan kemiskinan penduduk secara statistik tidak signifikan. Bagian ini mengidentifikasi propinsi yang ideal dalam arti relatif makmur wilayahnya dan relatif rendah penduduknya yang tergolong miskin.

Grafik 3 memperlihatkan hanya empat propinsi yang tergolong ideal dalam arti relatif makmur wilayahnya dan relatif kaya penduduknya (Pov-q0 rendah). Ke empat propinsi itu adalah Jakarta, Riau dan Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur (Kuadran IV). Sebagai catatan, seperti ditunjukkan oleh Grafik 2, tiga yang pertama juga tergolong ideal dilihat dari sisi distribusi kekayaan.

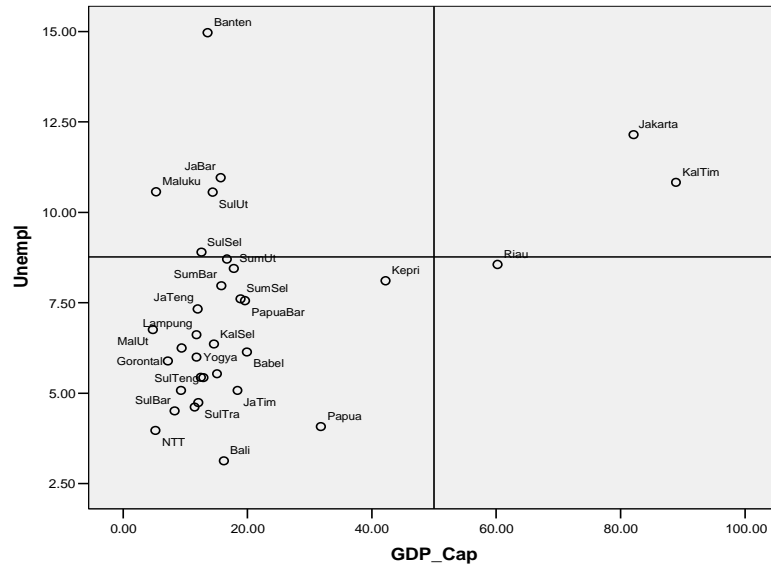
Bagaimana dengan propinsi yang paling tidak ideal? Jumlahnya relatif banyak sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 3 Kuadran II: Papua Barat, Maluku, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah,

Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Yogyakarta. Kembali Yogyakarta tergolong paling tidak ideal.

Grafik 3: Kemakmuran v.s Kemiskinan



Grafik 4: Kemakmuran v.s Pengangguran



Propinsi Makmur dengan Sedikit Penganggur

Seperti diperlihatkan oleh Tabel 3, antara kemakmuran dan pengangguran terdapat hubungan positif dan signifikan. Tantangannya dengan demikian adalah menciptakan pertumbuhan yang ramah terhadap ketenagakerjaan.

Grafik 4 memperlihatkan fakta yang mengejutkan: semua propinsi tidak ada yang memenuhi kondisi ideal dalam arti makmur wilayahnya dan rendah angka penganggurnya. Satu-satunya kekecualian dalam hal ini adalah Riau. Sebaliknya, yang dalam kondisi sangat tidak ideal ada lima propinsi: Banten, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Tampaknya ada yang salah dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.

Ringkasan

Jika alat potret difokuskan pada propinsi ekstrim maka kesimpulannya sederhana: Riau adalah propinsi yang paling makmur dan paling adil. Argumennya, Riau secara konsisten berada dalam Kudran IV: relatif makmur wilayahnya, relatif merata distribusi kekayaannya, relatif sedikit penduduknya yang miskin dan relatif sedikit penduduknya yang menganggur.....@

ⁱ Penulis berhutang budi kepada Saudara Ahmad Azhari yang telah berbaik hati mengolah data Susenas Modul 2009 untuk keperluan artikel ini. Untuk itu penulis berterimakasih. Terimakasih juga untuk Saudara Buyung Rimeto yang telah mengolah data Sakernas, untuk Saudara Dr. Indra Surbakti dan Saudara Syafii Nur yang telah memfasilitasi kelengkapan data untuk keperluan penulisan artikel ini.

ⁱⁱ Dalam visi ini dimensi keadilan didahulukan; dalam artikel ini sebaliknya. Perbedaan ini, tanpa mengurangi makna imperatif moral dalam perumusan visi bangsa itu, semata-mata menjelaskan bahwa, hemat penulis, yang layak dibagikan secara adil adalah kemakmuran, bukan kemiskinan (*shared poverty*), misalnya.

ⁱⁱⁱ Kata cenderung di sini perlu untuk menyatakan hubungan yang bersifat probabalistik. Cara lain untuk membaca hubungan itu: jika lapangan usaha non-pertanian tinggi maka PDB/kapita tinggi tetapi tidak selalu.

^{iv} Ini mungkin di luar dugaan kebanyakan pengamat sehingga perlu analisis lebih lanjut.

^v Ini juga mungkin di luar dugaan sehingga perlu kajian lebih lanjut.

^{vi} Ini mungkin memiliki implikasi kebijakan. Pertumbuhan ekonomi tampaknya belum 'ramah' terhadap pemerataan dan kemiskinan.

vii Hubungan negatif dengan kemiskinan sesuai dengan dugaan tetapi hubungan positif dengan pengangguran perlu kajian lebih lanjut. Analisis deret berkala tampaknya diperlukan untuk melengkapi kajian lebih lanjut.

viii Sebenarnya ada masalah teknis statistic di sini karena kemakmuran berbasis neraca nasional sedangkan ketimpangan berbasis survey rumahtangga (lihat Word Bank, *"Poverty Reduction and Growth: Vituous and Vicious Circles"*, 2006). Walaupun demikian, untuk mempermudah persoalan, isu ini tidak dibahas dalam artikel ini.